



**STATISTIK**  
**POLITIK DAN KEAMANAN**  
**KABUPATEN PURWOREJO**  
**2018**





**STATISTIK  
POLITIK DAN KEAMANAN  
KABUPATEN PURWOREJO  
2018**



**STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN  
KABUPATEN PURWOREJO  
2018**

ISBN : 978-623-92205-2-5

Katalog BPS : 4601001.3306

Nomor Publikasi : 33060.1925

Ukuran Buku : 18,2 x 25,7 cm

Jumlah Halaman : xii + 26

Naskah :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo

Gambar Kulit :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo

Diterbitkan oleh :

©Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo

Dicetak oleh :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik



## KATA PENGANTAR

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purworejo melakukan kegiatan statistik mulai dari pengumpulan sampai penyajian dan diseminasi data. Penyajian data berupa publikasi memudahkan pengguna data untuk memahami dan memanfaatkan data yang ada. Salah satu data yang dikumpulkan BPS Kabupaten Purworejo adalah Statistik Politik dan Keamanan.

Statistik Politik dan Keamanan dikumpulkan setiap tahun, dimana data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang berasal dari dinas atau instansi terkait. Data tahun 2018 diperoleh dari Kepolisian Resort (Polres), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Purworejo. Untuk melengkapi informasi terkait politik dan keamanan, dalam publikasi ini juga menggunakan data proyeksi penduduk hasil Sensus Penduduk 2010 (SP 2010). Penyusunan publikasi ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat pengguna data khususnya data politik dan keamanan.

Semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu dalam pengumpulan data dan penyusunan publikasi ini disampaikan terima kasih. Saran dan masukan untuk perbaikan publikasi ini sangat diharapkan agar penyusunan berikutnya lebih sempurna. Semoga publikasi ini bermanfaat dan dapat memenuhi kebutuhan data statistik politik dan keamanan bagi instansi/dinas pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat luas.

Purworejo, November 2019

Badan Pusat Statistik

Kabupaten Purworejo

Kepala,

R. Bagus Kalimat Susanto, S.Si.





## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>3</b>
1.1. Latar Belakang .....	3
1.2. Maksud dan Tujuan.....	4
1.3. Ruang Lingkup.....	4
<b>BAB II. METODOLOGI .....</b>	<b>5</b>
2.1. Jenis dan Sumber Data.....	5
2.2. Konsep dan Definisi.....	5
2.3. Penjelasan Teknis.....	7
<b>BAB III. KONDISI POLITIK DI PURWOREJO .....</b>	<b>9</b>
3.1. DPRD Kabupaten Purworejo.....	9
3.2. Organisasi Masyarakat/LSM .....	12
<b>BAB IV. KONDISI KEAMANAN DI PURWOREJO.....</b>	<b>15</b>
4.1. Penduduk Kabupaten Purworejo.....	16
4.2. Sarana dan Prasarana Keamanan Wilayah.....	18
4.3. Tindak Kejahatan di Kabupaten Purworejo.....	20







## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Persentase Anggota DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2018 menurut Jenis Kelamin .....	9
Gambar 2. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2018 menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin .....	10
Gambar 3. Jumlah Peraturan Daerah yang Dihasilkan DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2018 .....	11
Gambar 4. Jumlah Ormas/LSM yang Terdaftar di Bakesbangpol Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2018 .....	13
Gambar 5. Jumlah Penduduk Kabupaten Purworejo menurut Jenis Kelamin Tahun 2016-2018 .....	17
Gambar 6. Persentase Penduduk Kabupaten Purworejo menurut Jenis Kelamin Tahun 2018 .....	17
Gambar 7. Jumlah Personil Polisi Kabupaten Purworejo menurut Jenis Kelamin Tahun 2016-2018 .....	18
Gambar 8. Rasio Penduduk per Polisi di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2018 .....	19
Gambar 9. Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan ( Crime Total) dan Kejahatan Diselesaikan (Crime Cleared) Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2018 .....	21





## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Kejahatan yang Tercatat di Kabupaten Purworejo menurut Kelompok dan Jenis Kejahatan Tahun 2017-2018.....	21
--	----

<https://purworejokab.bps.go.id>





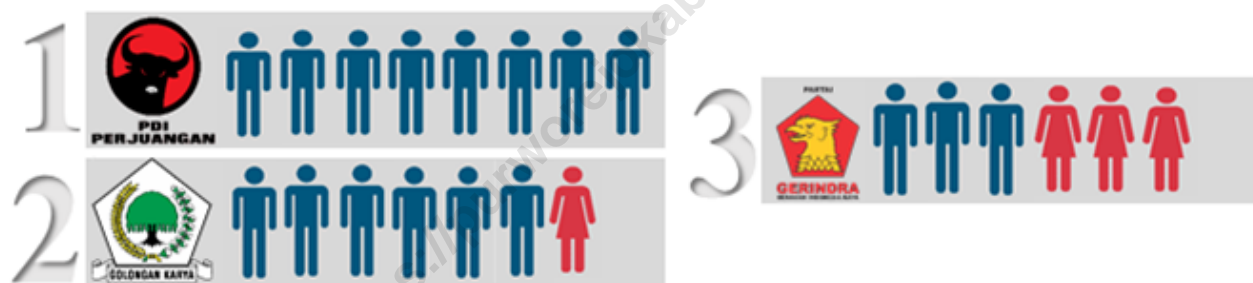
# Statistik Politik dan Keamanan Kabupaten Purworejo 2018

## Anggota DPRD Purworejo Tahun 2018

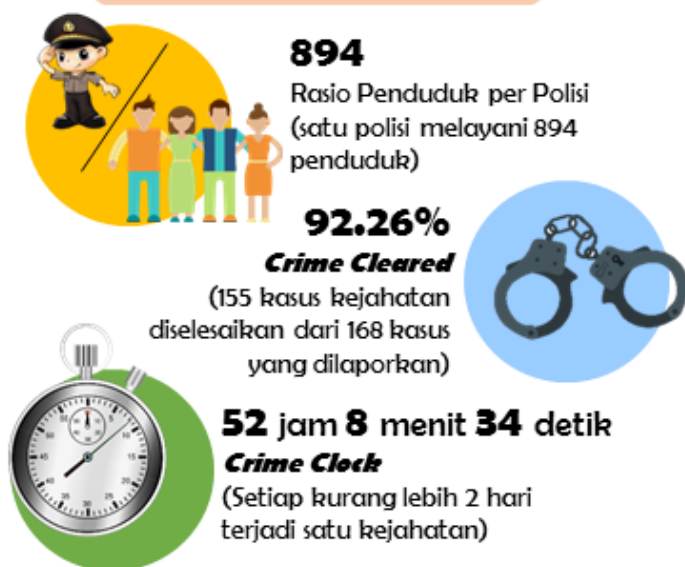


UU Nomor 8 Tahun 2012 pasal 58 dan 59 tentang Pemilu dan Peraturan KPU nomor 7 Tahun 2013 pasal 11 memberi mandat kepada partai politik untuk memenuhi **minimal 30% keikutsertaan perempuan** dalam politik atau lembaga perwakilan rakyat

## 3 Besar Jumlah Anggota DPRD Purworejo Tahun 2018 menurut Asal Parpol dan Jenis Kelamin



## Indikator Keamanan Tahun 2018



## 3 Besar Jenis Kejahatan Tahun 2018





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Tahun 2018 merupakan tahun politik bagi masyarakat Indonesia. Indonesia untuk pertama kalinya menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak. Geliat politik ditahun ini begitu terasa, momen Pilkada Serentak 2018 ini menjadi ajang pesta demokrasi bagi penduduk Indonesia sekaligus pemanasan menjelang pesta demokrasi sesungguhnya yaitu Pemilu 2019.

Era komunikasi digital dimana banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan media sosial membuat kondisi politik di Indonesia semakin memanas. Pembahasan tentang politik tidak hanya menjadi pembahasan hangat di acara televisi, tetapi menjadi perdebatan panas di media sosial. Orang-orang tanpa saling kenal tanpa batasan ruang dan waktu membahas isu politik terkini menjadi hal yang umum dijumpai setiap hari. Masyarakat secara bebas memonitor kebijakan pemerintah sekaligus mengkritik setiap kebijakan terutama yang terkait dengan rakyat. Demontrasi tidak hanya menghadirkan orang secara fisik, tetapi banyak dilakukan melalui petisi-petisi *online* untuk menjangkau opini masyarakat secara lebih luas. Informasi politik menjadi informasi yang menarik bagi semua kalangan. Baik akademisi, para pejabat hingga masyarakat biasa yang sebelumnya tidak peduli dengan dunia politik.

Disisi lain, perkembangan informasi di Indonesia juga membuat media berlomba-lomba menghadirkan berita dan informasi yang menarik. Berita kriminal sempat menjadi tontonan yang menarik bagi masyarakat. Berbagai masalah kehidupan dan ekonomi menyebabkan tindak kejahatan semakin meningkat jumlahnya dan semakin beragam jenisnya. Tingkat kebutuhan masyarakat akan rasa aman meningkat, dan kewaspadaan masyarakat terhadap tindak kriminalitas meningkat.



Kondisi tersebut menyebabkan perlunya masyarakat mengetahui data terkait politik dan keamanan terutama di daerahnya. Publikasi Statistik Politik dan Keamanan Kabupaten Purworejo 2017 ini berusaha menjawab kebutuhan masyarakat dan pemerintah khususnya Pemda Kabupaten Purworejo akan data politik dan keamanan di Kabupaten Purworejo. Semoga data ini dapat digunakan untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi kondisi politik dan keamanan di Kabupaten Purworejo, dan menambah informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan publikasi ini adalah memberi gambaran mengenai kondisi politik dan keamanan masyarakat. Tujuan khususnya adalah untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai karakteristik kejadian kriminalitas, konflik massal dan peran kepolisian beserta masyarakat dan DPRD dalam mewujudkan keamanan dan pembangunan politik.

## **1.3. Ruang Lingkup**

Publikasi Statistik Politik dan Keamanan Kabupaten Purworejo 2018 ini menyajikan gambaran politik dan kejadian tindak kejahatan/kriminalitas di Kabupaten Purworejo selama tahun 2018.





## BAB II

### METODOLOGI

#### 2.1. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi ini berasal dari data BPS dan data sekunder dari dinas/instansi yang dikumpulkan dengan cara kompilasi hasil registrasi/catatan. Data BPS yang dimaksud adalah proyeksi penduduk berdasarkan data hasil Sensus Penduduk 2010 (SP2010) sedangkan data dinas/instansi terkait, antara lain berasal dari Polres, DPRD, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo.

#### 2.2. Konsep dan Definisi

##### A. Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan (*Crime Total*)

Jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan (*Crime Total*) adalah jumlah peristiwa yang dilaporkan, yaitu setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat, atau peristiwa yang pelakunya tertangkap tangan oleh polisi. Indikator ini memberikan gambaran jumlah tindak pidana yang terjadi pada kurun waktu tertentu dengan tidak menutup kemungkinan masih adanya kasus yang tidak tercatat.

##### B. Jumlah Tindak Kejahatan yang Diselesaikan (*Crime Cleared*)

Jumlah tindak kejahatan yang diselesaikan (*Crime Cleared*) merupakan statistik yang menggambarkan jumlah kasus penyelesaian tindak pidana oleh polisi yang terjadi pada kurun waktu tertentu.

##### C. Resiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan (*Crime Rate*)

Resiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan (*Crime Rate*) adalah angka yang mengindikasikan peluang penduduk berisiko terkena tindak pidana per seratus ribu penduduk. Indikator ini mengindikasikan resiko penduduk terkena tindak pidana pada suatu waktu tertentu. Perbandingan antar waktu menunjukkan perkembangan tingkat keamanan penduduk.



#### **D. Pemerintah Daerah**

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan daerah (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).

#### **E. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga legislatif yang mewakili rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, memiliki fungsi legislasi (membuat peraturan daerah), penyusunan anggaran, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah.

#### **F. Partai Politik**

Partai Politik adalah organisasi penyalur keterlibatan warga negara dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik atau perebutan kekuasaan dan jabatan politik.

#### **G. Tindak Pidana Kejahatan/Kriminalitas atau Pelanggaran**

Tindak pidana kejahatan/criminal atau pelanggaran merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan KUHP atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.



## H. Peristiwa yang Dilaporkan

Peristiwa yang dilaporkan adalah setiap peristiwa yang dilaporkan masyarakat pada Kepolisian atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap

tangan oleh Kepolisian. Laporan masyarakat ini akan dicatat dan ditindaklanjuti oleh Kepolisian RI jika dikategorikan memiliki cukup bukti.

## I. Peristiwa yang Diselesaikan oleh Kepolisian

Peristiwa yang diselesaikan oleh kepolisian, adalah:

- Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa.
- Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang.
- Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas *Plichmatigheid*.
- Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi Kepolisian.
- Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia.
- Peristiwa yang telah kadaluwarsa.

### 2.3. Penjelasan Teknis

Beberapa indikator keamanan yang ditampilkan dalam publikasi ini diantaranya adalah :

- a. Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk (*crime rate*)

$$= \frac{\text{jumlah kejahatan pada tahun } t}{\text{jumlah penduduk}} \times 100.000$$

- b. Skala Waktu Kejahatan Tahun *t* (*crime clock*)

$$= \frac{365 \times 24 \times 60 \times 60}{\text{jumlah peristiwa kejahatan tahun } t} \times (\text{detik})$$



c. Persentase Penyelesaian Peristiwa Kejahatan (*crime clearance*)

$$= \frac{\text{jumlah peristiwa kejahatan yang diselesaikan}}{\text{jumlah peristiwa kejahatan yang dilaporkan}} \times 100\%$$

<https://purworejokab.bps.go.id>



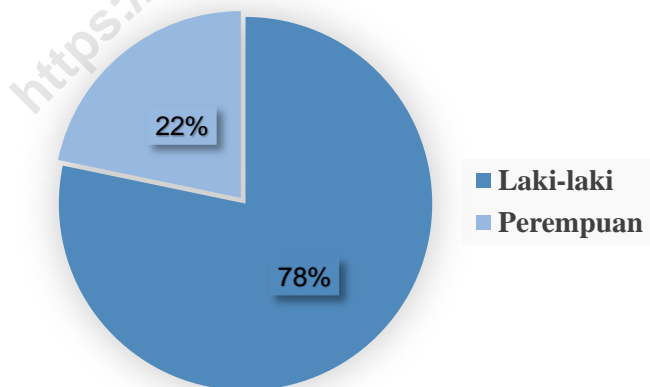
### BAB III

## KONDISI POLITIK DI PURWOREJO

Partisipasi politik masyarakat Kabupaten Purworejo dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terakhir dilakukan pada 2018 yaitu Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah pada 27 Juni 2018. Tahun 2019 masyarakat Kabupaten Purworejo kembali melakukan partisipasi politik pada Pemilu Legislatif 2019 dan Pemilihan Presiden 2019. Tahun 2020 Kabupaten Purworejo juga akan menggelar pesta demokrasi yaitu Pilkada Bupati dan Wakil Bupati.

### 3.1. DPRD Kabupaten Purworejo

DPRD Kabupaten Purworejo tahun 2018 memiliki 46 anggota. Dari jumlah tersebut hanya ada 10 anggota perempuan. Persentase anggota DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2018 menurut jenis kelamin ditampilkan dalam gambar berikut :



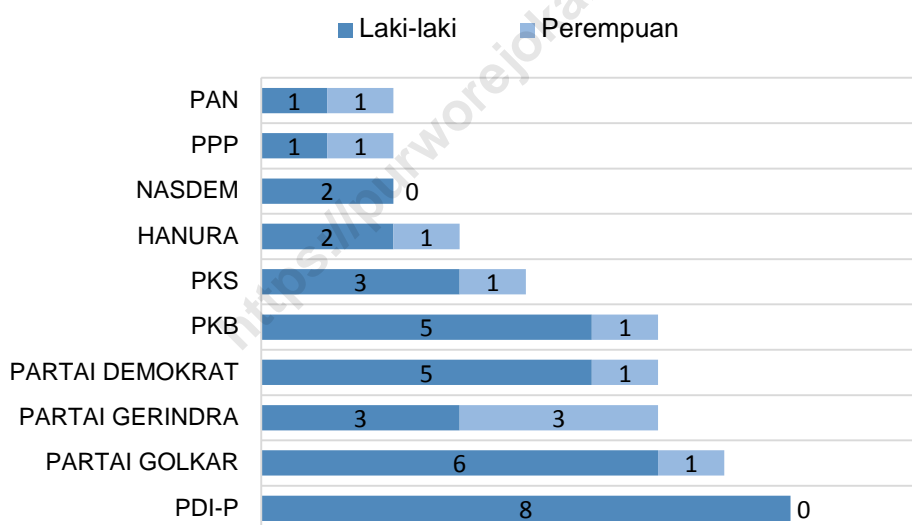
**Gambar 1. Persentase Anggota DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2018 menurut Jenis Kelamin**

Persentase anggota DPRD Kabupaten Purworejo perempuan hanya 22%, hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam DPRD Kabupaten Purworejo masih dibawah persentase yang diharapkan.



UU Nomor 8 Tahun 2012 pasal 58 dan 59 tentang Pemilu dan Peraturan KPU nomor 7 Tahun 2013 pasal 11 memberi mandat kepada partai politik untuk memenuhi minimal 30% keikutsertaan perempuan dalam politik atau lembaga perwakilan rakyat. Untuk pemilu yang akan datang keikutsertaan perempuan dari masing-masing partai politik harus lebih diperhatikan agar keterwakilan perempuan dalam DPRD Kabupaten Purworejo dapat memenuhi minimal 30% sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Anggota DPRD Kabupaten Purworejo merupakan wakil dari 10 Partai Politik. Berikut adalah jumlah anggota DPRD Kabupaten Purworejo berdasarkan jenis kelamin dan asal partai :



**Gambar 2. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2018 menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin**

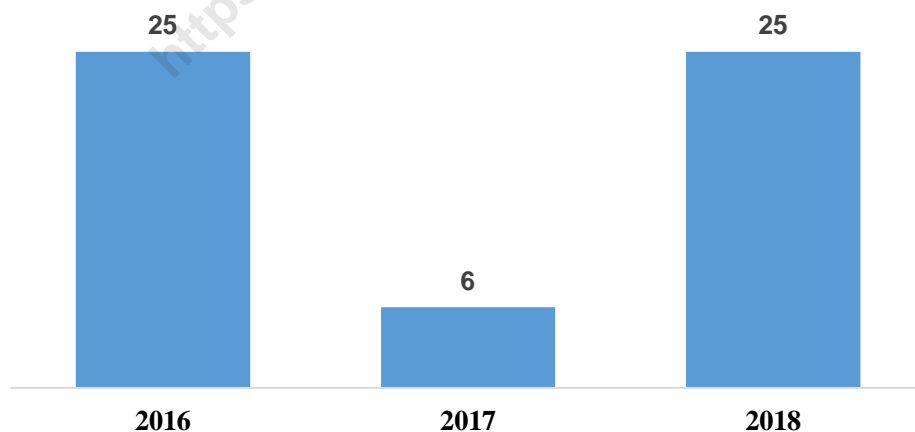
Dari gambar diatas terlihat bahwa partai politik dengan keterwakilan perempuan paling banyak adalah Partai Gerindra, dimana jumlah anggota DPRD perempuan sebanyak 3 orang. Partai politik yang keterwakilan perempuan persentasenya diatas 30% yaitu Partai Amanat Nasional (PAN),



Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Gerindra sebesar 50%, serta Partai Hanura sebesar 33%. Partai yang tidak mempunyai keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Purworejo adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) padahal partai politik ini memiliki wakil paling banyak di DPRD Kabupaten Purworejo.

Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa keterwakilan perempuan di DPRD masih kurang karena keterwakilan perempuan pada masing-masing partai juga belum sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada. Untuk DPRD hasil pemilu berikutnya keterwakilan perempuan dari masing-masing peserta pemilu dapat lebih diperhatikan.

Salah satu peran DPRD adalah menghasilkan Peraturan Daerah (Perda). DPRD Kabupaten Purworejo pada Tahun 2018 menghasilkan 25 Peraturan Daerah. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2017 yang hanya menghasilkan 6 Peraturan Daerah (Perda). Perbandingan jumlah peraturan daerah yang dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Purworejo dari tahun 2016-2018 dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 3. Jumlah Peraturan Daerah yang Dihasilkan DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2018**

Dari jumlah peraturan daerah pada Tahun 2018 tersebut tidak lebih dari 50% yaitu sebanyak 12 perda yang merupakan inisiasi (prakarsa) DPRD Kabupaten Purworejo. Akan tetapi, jumlah tersebut meningkat dibanding Tahun 2016 dan 2017 dimana jumlah perda yang merupakan inisiasi (prakarsa) DPRD Kabupaten Purworejo sebanyak 6 dan 4 perda.

### **3.2. Organisasi Masyarakat/LSM**

Selain dalam bentuk partisipasi dalam Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah, partisipasi politik masyarakat juga dapat dilakukan melalui Organisasi Masyarakat/LSM. Organisasi masyarakat merupakan kelompok yang diorganisir untuk memperjuangkan atau merepresentasikan kepentingan tertentu. Melalui organisasi diharapkan masyarakat dapat mengumpulkan aspirasinya untuk dapat disampaikan kepada pemerintah. Tanpa suatu organisasi, aspirasi dari satu orang akan sulit didengar oleh pemerintah. Organisasi masyarakat merupakan wadah aspirasi sekelompok masyarakat yang memiliki satu suara terhadap suatu kepentingan tertentu.

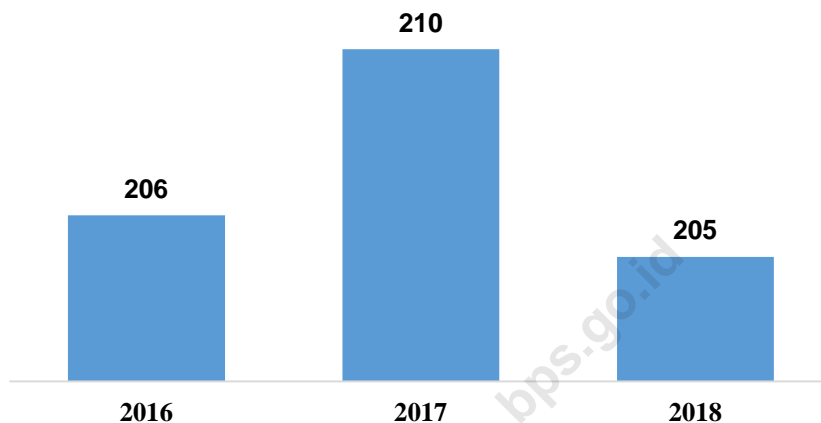
Organisasi masyarakat ini hampir sama dengan partai politik, tetapi ada satu perbedaan yang sangat mendasar diantara organisasi masyarakat dan partai politik. Organisasi masyarakat berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah (dalam waktu bersamaan) tanpa bertujuan memperoleh jabatan publik. Sedangkan partai politik tujuan utamanya menguasai jabatan publik, yaitu jabatan politik dan pemerintahan.

Organisasi Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi yang secara sukarela memberi pelayanan dan bantuan kepada masyarakat tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan baik secara individu maupun kelompok pada kegiatan yang dilakukannya. Semakin banyak Ormas/LSM yang produktif pada suatu daerah, maka semakin terbantu pula tugas dari pemerintahan daerah.





Jumlah Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar di Bakesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) Kabupaten Purworejo tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut :



**Gambar 4. Jumlah Ormas/LSM yang Terdaftar di Bakesbangpol Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2018**

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa jumlah Organisasi Masyarakat/ Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Purworejo yang terdaftar Tahun 2018 menurun dibanding Tahun 2017 dan 2016. Meskipun jumlah yang terdaftar pada Tahun 2018 lebih sedikit dibanding tahun 2017, tetapi jumlah Ormas/LSM baru yang mendaftar pada Tahun 2018 sebanyak 11 ormas/LSM naik dibanding Tahun 2017 dimana ormas/LSM yang mendaftar hanya 4 ormas/LSM. Peningkatan jumlah Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat yang mendaftar tersebut menunjukkan minat masyarakat untuk membentuk Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat meningkat. Akan tetapi, jumlah ormas/LSM yang terdaftar berkurang karena banyak ormas/LSM yang sudah tidak aktif lagi di Tahun 2018. Dengan kondisi ini mungkin diperlukan sosialisasi dari Bakesbangpol untuk meningkatkan aktifitas atau kegiatan ormas/LSM sehingga tidak mati, agar masyarakat memiliki wadah untuk menyampaikan aspirasi.

Selain itu, perlu dilakukan pembinaan terhadap ormas/LSM yang sudah terbentuk agar kegiatan organisasi tersebut lebih dioptimalkan, sehingga dapat lebih bermanfaat bagi anggota organisasi tersebut dan bagi masyarakat sekitar.

<https://purworejokab.bps.go.id>



## **BAB IV**

### **KONDISI KEAMANAN DI PURWOREJO**

Tingginya tuntutan hidup pada saat ini dan penurunan kondisi perekonomian memicu tingginya intensitas kejahatan, khususnya kejahatan konvensional. Di samping itu, pesatnya teknologi informasi dan komunikasi turut mendukung munculnya jenis-jenis kejahatan baru seperti penyebaran pornografi, pencemaran nama baik, penipuan dengan beraneka ragam modus operandi, atau perdagangan perempuan, baik melalui pesan singkat (short message service/SMS) maupun melalui jaringan internet. Akses informasi dan telekomunikasi yang dapat menjangkau seluruh pelosok negeri seperti televisi, handphone, dan internet dapat menginspirasi masyarakat untuk bertindak kriminal layaknya kejahatan perkotaan maupun kejahatan di luar negeri.

Selain faktor-faktor di atas ada hal lain yaitu komposisi penduduk, dimana penduduk Indonesia merupakan penduduk yang sangat heterogen dimana komposisi penduduknya terdiri dari berbagai macam Suku, Agama, dan Ras (SARA) tidak terkecuali penduduk di Provinsi Jawa Tengah. Komposisi penduduk di Provinsi Jawa Tengah yang multikultur dan multi agama menyimpan kerawanan konflik antar kelompok tersebut jika hubungan antar kelompok tersebut tidak dikelola dengan baik, disamping itu jumlah personil keamanan (Polisi) turut juga mempengaruhi kondisi lingkungan. Jumlah personil keamanan yang mencukupi akan memudahkan dalam pengawasan kepada kondisi lingkungan.

Saat ini rasa aman menjadi salah satu kebutuhan yang penting bagi masyarakat. Isu-isu kejahatan saat ini mudah diterima oleh masyarakat, sehingga tingkat kekhawatiran dan kewaspadaan masyarakat terhadap tindak kejahatan meningkat. Menghadapi hal tersebut, seharusnya



pemerintah dalam hal ini kepolisian lebih berbenah untuk menghadapi gejala di masyarakat, agar kebutuhan masyarakat akan rasa aman dapat terpenuhi. Tugas polisi sebagai pelayan masyarakat harus lebih ditingkatkan seiring tuntutan dari masyarakat.

#### **4.1. Penduduk Kabupaten Purworejo**

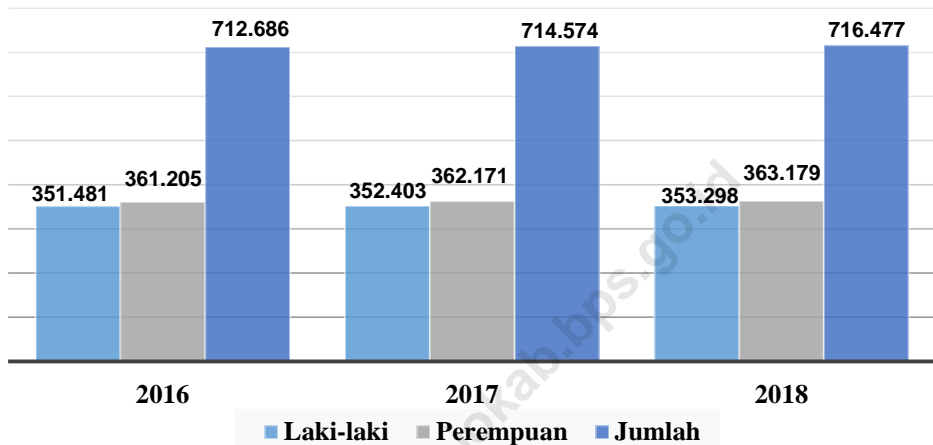
Kabupaten Purworejo merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 1.034,82 km<sup>2</sup> yang dibagi menjadi 16 kecamatan dengan total desa/kelurahan 494 desa/kelurahan. Jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Purworejo paling banyak se-Provinsi Jawa Tengah. Banyaknya pemerintahan dalam lingkup kecil yaitu desa/kelurahan seharusnya memudahkan pemerintah Kabupaten Purworejo untuk mengatur masyarakat. Diperlukan koordinasi yang baik dengan pemerintah desa/kelurahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Jumlah penduduk merupakan informasi awal yang penting sebelum mengetahui indikator-indikator keamanan yang erat kaitannya dengan jumlah penduduk. BPS melakukan penghitungan jumlah penduduk melalui Sensus Penduduk. Sensus Penduduk yang terakhir dilakukan adalah Sensus Penduduk 2010, setelah itu BPS melakukan penghitungan proyeksi penduduk untuk mengestimasi jumlah penduduk di tahun-tahun berikutnya.

Jumlah Penduduk Kabupaten Purworejo hasil proyeksi Sensus Penduduk Tahun 2010 menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Purworejo terus bertambah dari tahun 2016-2018, penambahan penduduk sebesar 1.888 jiwa di tahun 2017 dan 1.903 jiwa di tahun 2018. Pertambahan penduduk sekitar 0.3% per tahun. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk Kabupaten Purworejo lebih besar penduduk perempuan meskipun selisihnya hanya sekitar 2%, komposisi tersebut cenderung tidak berubah dari tahun 2016-2018.

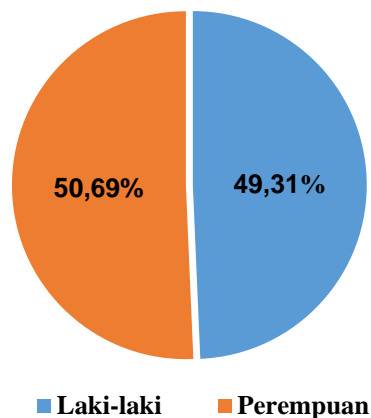


Jumlah penduduk Kabupaten Purworejo hasil proyeksi Sensus Penduduk 2010 menurut jenis kelamin Tahun 2016-2018 dan persentase penduduk Kabupaten Purworejo menurut jenis kelamin Tahun 2018 dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : Proyeksi Penduduk Hasil Sensus Penduduk 2010

**Gambar 5. Jumlah Penduduk Kabupaten Purworejo menurut Jenis Kelamin Tahun 2016-2018**

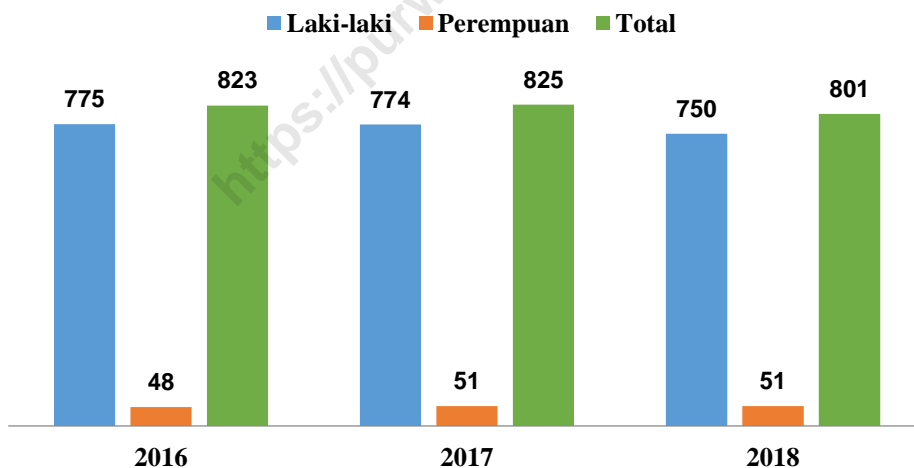


**Gambar 6. Persentase Penduduk Kabupaten Purworejo menurut Jenis Kelamin Tahun 2018**

## 4.2. Sarana dan Prasarana Keamanan Wilayah

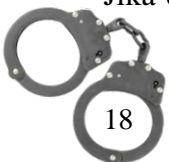
Kondisi keamanan di suatu wilayah salah satunya dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas dan jumlah personil keamanan di wilayah tersebut. Fasilitas keamanan di Kabupaten Purworejo diantaranya adalah Polres, Polsek, dan jumlah pos polisi. Kabupaten Purworejo memiliki satu Polres, 16 Polsek di setiap kecamatan masing-masing satu polsek, dan 5 pos polisi. Jumlah pos polisi di Kabupaten Purworejo tidak mengalami perubahan dalam kurun waktu 2016-2018 yaitu sebanyak 5 pos polisi yaitu Pos Polisi Kutoarjo, Botorejo, perempatan SMK N 1 Purworejo, pertigaan tugu, dan Pendowo Purwodadi.

Selain fasilitas kantor polisi, kondisi keamanan juga dipengaruhi oleh jumlah personil keamanan yang ada. Jumlah personil polisi menurut jenis kelamin di Kabupaten Purworejo dari tahun 2016-2018 dapat dilihat pada gambar berikut :



**Gambar 7. Jumlah Personil Polisi Kabupaten Purworejo menurut Jenis Kelamin Tahun 2016-2018**

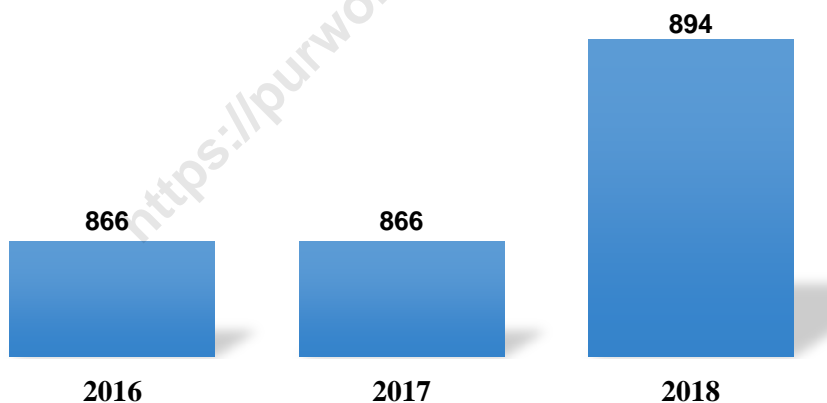
Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa jumlah personil polisi di Kabupaten Purworejo Tahun 2018 menurun dibanding tahun sebelumnya. Jika dilihat menurut jenis kelamin, personil polisi di Kabupaten Purworejo



didominasi oleh laki-laki. Hal itu terjadi sejak tahun 2016-2018. Jumlah personil polisi wanita (Polwan) Tahun 2018 tetap dibanding Tahun 2017 yaitu 51 personil.

Tugas polisi adalah melayani masyarakat khususnya penduduk Kabupaten Purworejo. Jumlah personil polisi di suatu wilayah hendaknya disesuaikan dengan jumlah penduduk yang dilayani di wilayah tersebut. Jika proporsinya tidak ideal, maka tugas polisi sebagai pelayan masyarakat akan kurang optimal karena tidak semua masyarakat dapat terlayani dengan baik. Oleh karena itu, rasio penduduk per polisi menjadi salah satu indikator yang penting untuk diketahui terutama untuk pengambilan keputusan penempatan personil polisi di suatu wilayah.

Berikut ini adalah rasio penduduk per polisi di Kabupaten Purworejo tahun 2016-2018 :



**Gambar 8. Rasio Penduduk per Polisi di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2018**

Gambar di atas menunjukkan bahwa pada Tahun 2018 satu orang personil polisi harus melayani 894 penduduk. Rasio ini naik dibanding Tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa beban tugas polisi pada Tahun 2018 lebih berat dibanding Tahun 2017 dan 2016 karena jumlah penduduk yang dilayani setiap personil bertambah. Jika beban tugas tersebut merupakan indikasi



tingkat keamanan di Purworejo, maka dapat dikatakan bahwa terjadi penurunan tingkat keamanan di Kabupaten Purworejo pada Tahun 2018.

Selain itu, rasio penduduk per polisi di Kabupaten Purworejo juga belum ideal, idealnya rasio polisi terhadap penduduk menurut PBB adalah 1:400 (Siregar, Sarah Nuraini dkk, 2015). Untuk mencapai rasio ideal tersebut perlu adanya tambahan personil polisi di Kabupaten Purworejo menjadi sekitar dua kali lipat dari jumlah personil yang ada saat ini.

#### **4.3. Tindak Kejahatan di Kabupaten Purworejo**

Jumlah kejahatan yang tercatat di kepolisian (*crime total*) di Kabupaten Purworejo pada tahun 2018 sebanyak 168 kasus, jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun 2017 sebanyak 184 kasus, dan tahun 2016 sebanyak 221 kasus. Jika jumlah kejahatan berbanding terbalik dengan tingkat keamanan di suatu wilayah, maka dari hasil pencatatan kepolisian tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat keamanan di Kabupaten Purworejo meningkat dari tahun 2016-2018.

Selain jumlah kejahatan yang tercatat di kepolisian, hal yang perlu diperhatikan adalah jumlah kejahatan yang diselesaikan (*crime cleared*). Pada Tahun 2018 polisi di Kabupaten Purworejo berhasil menyelesaikan 155 kasus atau sekitar 92,26% dari jumlah kejahatan yang dilaporkan Tahun 2018, jumlah ini turun dibanding Tahun 2017 dan 2016 yaitu sebanyak 185 dan 201 kasus yang berhasil diselesaikan. Hal ini menunjukkan kinerja polisi yang menurun, penurunan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai hal diantaranya jumlah personil polisi dan kondisi lainnya. Hal ini dapat menjadi evaluasi untuk peningkatan kinerja polisi tahun-tahun berikutnya.

Berikut adalah grafik jumlah kejahatan yang dilaporkan dan berhasil diselesaikan di tahun 2016-2018 :







**Gambar 9. Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan ( *Crime Total*) dan Kejahatan Diselesaikan (*Crime Cleared*) Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2018**

Selain itu secara total perlu diperhatikan jumlah kejahatan secara lebih detil menurut jenis kejahatannya. Banyaknya kasus kejahatan di tahun 2017-2018 berdasarkan kelompok dan jenis kejahatan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1. Jumlah Kejahatan yang Tercatat di Kabupaten Purworejo menurut Kelompok dan Jenis Kejahatan Tahun 2017-2018**

No	Kelompok/Jenis Kejahatan	2017		2018	
		Lapor	Selesai	Lapor	Selesai
<b>I. Kejahatan Konvensional</b>					
1	Pembakaran	-	-	1	1
2	Kebakaran	6	6	14	14
3	Pemalsuan Surat	1	1	1	2
4	Perjudian	21	21	6	6
5	Melarikan Wanita dibawah Umur	1	1	1	1
6	Penghinaan	1	1	-	-
7	Pembunuhan	1	1	1	1
8	Penganiayaan Berat (Anirat)	2	2	6	6
9	Penganiayaan Ringan (Anira)	17	17	3	3
10	Pencurian Dengan Kekerasan (Curas)	4	4	5	3
11	Pencurian Dengan Pemberatan (Curat)	35	34	41	34
12	Pencurian Biasa	14	13	12	11

No	Kelompok/Jenis Kejahatan	2017		2018	
		Lapor	Selesai	Lapor	Selesai
13	Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor)	19	21	17	15
14	Penggelapan	15	12	24	24
15	Penipuan	15	17	3	2
16	Pengrusakan	2	2	-	-
17	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	4	4	4	4
18	Narkotika	6	6	10	10
19	Lain-lain	18	20	18	17
<b>IV. Kejahatan Kekayaan Negara</b>					
1	Korupsi	-	-	1	1

Sumber : diolah dari Statistik Politik dan Keamanan 2019

Bila dilihat dari jenis kejahatannya, pada tahun 2018 tiga jenis kejahatan yang paling banyak terjadi adalah Pencurian dengan Pemberatan (Curat), Penggelapan, dan Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor). Pencurian dengan Pemberatan (Curat) sejak tahun 2017 menduduki peringkat tertinggi jumlah kejahatan di Kabupaten Purworejo. Jumlah kejahatan Pencurian dengan Pemberatan (Curat) yang dilaporkan pada tahun 2018 mengalami peningkatan dibanding tahun 2017. Dari 41 kasus Curat yang dilaporkan pada tahun 2018, hanya 34 yang berhasil diselesaikan atau hanya sekitar 83%, sisanya menjadi pekerjaan rumah bagi Polisi di tahun berikutnya. Kejahatan Penggelapan pada Tahun 2018 menduduki peringkat kedua, padahal Tahun 2017 kejahatan ini tidak masuk kedalam tiga besar kejahatan yang terjadi di Kabupaten Purworejo, Hal ini memerlukan perhatian yang lebih agar jenis kejahatan ini dapat dikendalikan kejadiannya di masyarakat. Untuk kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) sejak tahun 2017 menduduki peringkat tiga besar jumlah kejahatan yang terjadi di Kabupaten Purworejo. Akan tetapi, jumlah kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) mengalami penurunan dibanding tahun 2017.



Selain jenis kejahatan yang jumlahnya tinggi, jenis kejahatan lain yang perlu diwaspadai adalah kejahatan yang jumlahnya meningkat pada Tahun 2018 dibanding Tahun 2017. Jenis kejahatan tersebut adalah kebakaran dan narkoba. Meskipun jumlah jenis kejahatan tersebut sedikit, tetapi jumlahnya yang terus meningkat dalam kurun waktu 2017-2018 perlu diperhatikan agar jumlahnya tidak terus meningkat. Kebakaran bisa saja terjadi karena ketidaksengajaan ataupun sengaja. Diperlukan kesadaran yang tinggi pada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian untuk mencegah terjadinya kebakaran. Disisi lain Narkoba dan Psikotropika saat ini menjadi perhatian seluruh pihak. Perang terhadap narkoba diserukan oleh semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Kesadaran masyarakat juga perlu ditingkatkan untuk melakukan antisipasi penyalahgunaan narkoba di lingkungannya.

Selain hal-hal diatas, kita juga perlu mengapresiasi kinerja Kepolisian dalam menekan jumlah kejahatan. Kejahatan yang pada Tahun 2018 jumlahnya menurun cukup signifikan adalah perjudian, penganiayaan ringan (anira), dan penipuan. Pada tahun 2017 perjudian menempati urutan kedua kejahatan yang dilaporkan, jumlahnya mencapai 21 kasus dimana semu berhasil diselesaikan pada tahun tersebut. Tahun 2018 jumlahnya menurun cukup signifikan menjadi hanya 6 kasus dan semuanya berhasil diselesaikan pada tahun tersebut. Selain itu Penganiayaan Ringan (Anira) yang pada tahun 2017 dilaporkan sebanyak 17 kasus, pada tahun 2018 jumlahnya menurun cukup signifikan menjadi hanya 3 kasus yang dilaporkan dan semuanya berhasil diselesaikan. selanjutnya adalah kejahatan penipuan yang pada tahun 2017 dilaporkan sebanyak 15 kasus, pada tahun 2018 jumlahnya menurun cukup signifikan menjadi 3 kasus yang dilaporkan dan 2 diantaranya berhasil diselesaikan pada tahun 2018.



Selanjutnya jika dilihat dari indikator keamanan yang lain yaitu selang waktu kejahatan (*crime clock*), *crime clock* tahun 2018 adalah 52 jam 8 menit 34 detik yang artinya kejahatan terjadi setiap 52 jam 8 menit 34 detik. Atau dengan kata lain kurang lebih dalam waktu 2 hari terjadi 1 kasus tindak kejahatan. Indikator ini menunjukkan perbaikan jika dibandingkan tahun 2017 dimana *crime clock* 47 jam 36 menit 31 detik dan tahun 2016 *crime clock* 39 jam 38 menit 16 detik. Dari indikator ini dapat dikatakan bahwa tingkat keamanan di Kabupaten Purworejo terus meningkat dalam kurun waktu 2016-2018.

Meskipun secara garis besar kinerja kepolisian dan tingkat keamanan di Kabupaten Purworejo terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2016-2018, pemerintah dan masyarakat harus senantiasa bekerja sama demi terwujudnya Kabupaten Purworejo yang lebih aman dan dapat menekan jumlah kejahatan yang terjadi di Kabupaten Purworejo. Masyarakat juga diharapkan peduli dan segera melaporkan jika terjadi tindak kejahatan di lingkungannya, agar data yang diperoleh lebih akurat dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pemerintah dalam hal ini juga diharapkan lebih aktif menghimpun informasi dari masyarakat terkait tindak kejahatan yang terjadi agar masalah keamanan masyarakat dapat dimonitoring dengan baik, dan dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan keamanan di Kabupaten Purworejo.

#### **4.4. Korban Kejahatan di Kabupaten Purworejo**

Selain jumlah kejahatan yang dilaporkan dan yang diselesaikan di Kabupaten Purworejo, Polres Kabupaten Purworejo juga mencatat jumlah korban kejahatan di Kabupaten Purworejo. Informasi ini penting diketahui oleh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kejahatan-kejahatan yang terjadi di Kabupaten Purworejo. Berikut adalah tabel jumlah korban kejahatan di Kabupaten Purworejo berdasarkan jenis kejahatan dan



jenis kelamin Tahun 2017-2018 :

**Tabel 2. Jumlah Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kejahatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Purworejo Tahun 2017-2018**

No	Kelompok/Jenis Kejahatan	2017		2018	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
<b>I. Kejahatan Konvensional</b>					
1	Pembakaran	-	-	-	1
3	Pemalsuan Surat	1	-	1	-
5	Melarikan Wanita dibawah Umur	-	1	-	1
6	Penghinaan	-	1	-	-
7	Pembunuhan	1	-	1	-
8	Penganiayaan Berat (Anirat)	1	1	1	-
9	Penganiayaan Ringan (Anira)	1	1	1	1
10	Pencurian Dengan Kekerasan (Curas)	3	1	2	1
11	Pencurian Dengan Pemberatan (Curat)	25	10	17	17
12	Pencurian Biasa	7	6	7	1
13	Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor)	20	2	17	2
14	Penggelapan	11	-	3	2
15	Penipuan	4	1	2	2
16	Pengrusakan	2	-	-	-
17	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	1	3	1	4

Sumber : diolah dari Statistik Politik dan Keamanan 2019

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2018 kejahatan yang korbannya paling banyak adalah pencurian dengan pemberatan dengan jumlah korban 17 orang laki-laki dan 17 orang perempuan. Jumlah tersebut secara total hampir sama dengan tahun 2017 dimana terdapat 25 korban laki-laki dan 10 korban perempuan. Kejahatan lain yang korbannya cukup banyak adalah pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dengan korban pada tahun 2018 sebanyak 17 laki-laki dan 2 perempuan, jumlah tersebut sedikit menurun



jika dibanding tahun 2017 dimana jumlah korban 20 laki-laki dan 2 perempuan. Posisi ketiga jenis kejahatan yang paling banyak korbannya adalah pencurian biasa dengan jumlah korban tahun 2018 sebanyak 7 laki-laki dan 1 perempuan, jumlah tersebut juga turun dibanding tahun sebelumnya dimana jumlah korban yaitu 7 laki-laki dan 6 perempuan.

Selain jenis kejahatan dengan jumlah korban paling banyak, jenis kejahatan lain yang perlu diperhatikan adalah kejahatan yang jumlah korban perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Hal ini mengingatkan kejahatan terhadap perempuan menjadi perhatian berbagai pihak baik pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun swasta melalui berbagai LSM yang bergerak di bidang perlindungan perempuan. Kejahatan yang korban perempuannya lebih banyak dibanding laki-laki adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kejahatan ini perlu menjadi perhatian agar jumlah korban bisa ditekan untuk waktu yang akan datang, juga kejahatan-kejahatan lain yang juga harus selalu diwaspadai agar tidak terjadi lagi dengan meningkatkan kerjasama antara masyarakat dan Polri.



# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA

<https://purworejokab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN PURWOREJO**

Jl. Banyuurip, Purworejo, 54171, Telepon: (0275) 32218  
Email: bps3306@bps.go.id

ISBN 978-623-92205-2-5

